
OPTIMALISASI PERANAN PEMBINAAN MANAJEMEN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA KOPERASI DI KABUPATEN SUMEDANG

Oleh :

Ila Karmila

Fakultas Ekonomi - Universitas Singaperbangsa Karawang
dhila112000@yahoo.co.id

Dede Jajang Suyaman

Fakultas Ekonomi - Universitas Singaperbangsa Karawang
jajang@fe.unsika.ac.id

Odang Kusmayadi

Fakultas Ekonomi - Universitas Singaperbangsa Karawang
odang.kusmayadi@fe.unsika.ac.id

Article Info

Article History :

Received 29 July - 2020

Accepted 20 August - 2020

Available Online

07 Sept - 2020

Abstract

The essence of the problem in this research is still not optimal implementation of cooperative management by cooperatives located in Sumedang District, many cooperatives who do not report to the Department of Cooperatives, small business, medium enterprises, trade and industry Sumedang. The purpose of this research is to know the role of coaching management cooperative by the Department of Cooperatives, Small business, intermediate, trade and industry Sumedang district. The method used in this research is a qualitative method of research by examining the three cooperatives that were used as samples in this study, namely the Indonesian Employee Cooperative Cooperative Health Officer Sumedang, employee cooperative PT. PLN (Persero) Sumedang, and BMT Al Amanah Sumedang. The result of this research is that the Department of Cooperative Department of Cooperatives, small business, medium enterprises, trade, Sumedang District has a strategic role in improving the quality of cooperatives in Sumedang district through the implementation of a better cooperative management system so that cooperatives in the cooperative performance in the district can be said quality, but still there are various barriers, namely the low cooperative resource , and the unavailability of information containers to accelerate the reporting and development of cooperative material management. Recommendation of the results of this research is necessary to the role of local governments in the increase in the development budget management cooperative, provision of adequate facilities and infrastructures, improvement of the quality of human resources cooperative cooperatives through education programs and level training, and improvement of the supervision of cooperatives by the Department of Cooperatives, small business, medium enterprises, trade industry Sumedang District.

Keyword :

Coaching Cooperative
Management, Cooperative
Performance

1. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai sokoguru dan bagian integral dalam perekonomian nasional, maka perannya sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian rakyat.

Namun demikian, masih dirasakan kurangnya respon dari berbagai pihak dalam memajukan dan mengembangkan koperasi walaupun payung hukum pemerintah tersedia.

Eksistensi berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yaitu meliputi sumber daya ekonomi. Nasution dan Thamrin (2016:59) menyatakan, “Eksistensi koperasi berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu meliputi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh organisasi dan juga keadilan sosial ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan.” Pedoman Peningkatan Koperasi berdasarkan pada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008 merupakan konsep pengukuran yang dapat menunjukkan kinerja koperasi secara menyeluruh yang berlaku saat ini.

Dalam meningkatkan kinerja koperasi diperlukan Peranan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sebagai liding sektor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mengatasi permasalahan tersebut, merumuskan program pembinaan manajemen koperasi dan mengimplementasikannya dalam kerangka manajemen berbasis mutu. Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia koperasi menjadi salah satu prioritasnya.

Berikut ini akan dibahas pencapaian tujuan koperasi masih belum mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi dalam hal ini koperasi.

Tabel 1. Data Pembinaan Koperasi Kabupaten Sumedang Tahun 2018

No	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Target Koperasi yang akan dibina	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pembinaan
1	Produsen/Pertanian	96	36	32
2	Pemasaran	10	5	4
3	Konsumen	410	136	124
4	Jasa	3	3	2
5	Simpan Pinjam	67	20	18
	JUMLAH	586	200	180

Sumber : Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian, Tahun 2019.

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target pembinaan koperasi yang diharapkan oleh organisasi masih belum dapat terealisasi, hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat antara lain masih terbatasnya anggaran pembinaan, terbatasnya pegawai yang mampu melaksanakan pembinaan sesuai kompetensinya, pegawai

yang memiliki kompetensi terhadap pembinaan koperasi mutasi ke dinas lain dan terbatasnya sarana dan prasarana.

Rendahnya manajemen pembinaan koperasi yang dilaksanakan oleh koperasi diduga karena masih kurang diterapkannya kebijakan dalam pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, hal ini berdasarkan hasil observasi yang dapat terlihat sebagai berikut :

- Terbatasnya pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang memiliki kompetensi di bidang koperasi, karena sebagian besar mutasi ke dinas lain;
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan program pembinaan manajemen koperasi;
- Tidak memiliki UPTD bidang koperasi di tiap-tiap kecamatan;
- Terbatasnya pendidikan pelatihan perkoperasian untuk Pegawai Negeri Sipil yang membidangi koperasi maupun dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- Pelaksanaan pembinaan manajemen koperasi terbatas pada anggaran kegiatan.

Manajemen koperasi adalah proses mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, material dan keuangan koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan, yaitu untuk menghasilkan manfaat yang dapat digunakan oleh anggotanya dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonominya. Proses manajemen koperasi merupakan serangkaian kegiatan yang teratur, melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian. Optimal mengandung maksud bahwa sumber daya koperasi dikelola secara efisien dan efektif sedangkan tujuan adalah hasil yang diharapkan biasanya diukur dengan efisiensi proses kegiatan usaha dan efektifitas dari tujuan yang dicapai.

Sumber daya koperasi sekurang-kurangnya terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya fisik (material) dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia koperasi terdiri atas anggota, pengurus, manajer, pegawai dan pengawas dalam mengelola sumber daya koperasi dengan sebaik-baiknya (efektif dan efisien), selanjutnya yang dilakukan pembinaan manajemen koperasi.

Permasalahan koperasi secara umum meliputi lemahnya sumber daya manusia

(SDM) pengelola, kurangnya daya dukung permodalan, kesulitan pemasaran, praktek rentenir, gagap teknologi, kurangnya inovasi, kuantitas dan kualitas produk rendah. Adapun permasalahan yang terjadi pada operasional koperasi di Kabupaten Sumedang sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Permasalahan Koperasi di Kabupaten Sumedang

No	Jenis	Masalah
1	Sumber Daya Manusia	1) Lemahnya kesadaran 2) Lemahnya partisipasi 3) Lemahnya kedisiplinan 4) Lemahnya jiwa kewirausahaan 5) Lemahnya keterampilan 6) Lemahnya pendidikan dan teknologi 7) Adanya kepentingan pribadi.
2	Permodalan	1) Sulitnya sumber dana 2) Adanya hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi 3) Kurangnyainovasi dalam memperbanyak produk koperasi.
3	Kelembagaan	1) Lemahnya sistem manajemen koperasi 2) Lemahnya modernisasi 3) Lemahnya kemandirian koperasi 4) Kurangnya pemasaran 5) Sulitnya jaringan usaha dan perijinannya 6) Koperasi belum mampu bertahan dalam berkompetisi dengan perbankan 7) Sulitnya proses dalam mendirikan koperasi 8) Sulitnya merekrut anggota.

Sumber : Data hasil penelitian, diolah tahun 2019.

Dampak permasalahan koperasi yang tidak kunjung menemui jalan keluar mengakibatkan beberapa koperasi mengalami kevakuman operasional dan tidak ada rencana aksi selanjutnya dari para pengurus.

Tabel 3. Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Sumedang

NO	NAMA KOPERASI	JUMLAH KOPERASI	STATUS	
			AKTIF	TDK AKTIF
1	Produsen	96	65	31
2	Pemasaran	10	9	1
3	Konsumen	410	288	122
4	Jasa	3	3	0
5	Simpan Pinjam	67	58	9
	JUMLAH	586	423	163

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Tahun 2019.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS Koperasi

Arifin Sition, dkk (2001:16) menjelaskan, “Kata koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *coopere*, yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya bekerja, sehingga *cooperation* artinya bekerja bersama-sama.” Selanjutnya menurut ILO (*International Labour Organization*) dalam Arifin Sition (2001:16), pengertian koperasi adalah :

Cooperative defined as an asociation of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and thorough the formation of a deocratically contolled bussiness organization, makin euitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of undertaking.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, “pengertian koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dari definisi tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi yang dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan adanya kerjasama para anggotanya usaha yang dijalankan harus sesuai dengan asas dan prinsip koperasi.

Manajemen Koperasi

Sonny Sumarsono (2003:71) menyatakan, “Manajemen merupakan salah satu bagian penting dari organisasi koperasi. Berhasil tidaknya suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemennya”. Apabila orang-orang dalam manajemen ini memiliki kejujuran, kecakapan dan giat dalam bekerja maka besarlah kemungkinannya koperasi akan maju pesat atau atau setidaknya tidaknya tendensi untuk terjadinya kebangkrutan dapat ditanggulangi. Tetapi sebaliknya, apabila orang-orang ini tidak cakap, curang atau tidak berwibawa tentulah koperasi pun akan mundur atau tidak semaju seperti yang diharapkan. Kita sering melihat, terjadinya kesulitan-kesulitan dalam soal keuangan, soal yang menarik perhatian anggota pada koperasi, pemasaran barang-barang, organisasi yang kacau dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan

semacam itu pangkal persoalannya karena ketidakberesan pada manajemen.

Sonny Sumarsono (2003:75) menyatakan, “peranan manajemen adalah membuat koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya, baik tujuan para anggotanya, misalnya untuk mencapai perbaikan tingkat hidup atau sedikitnya meringankan biaya hidup sehari-hari, maupun tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal yang pertama, manajemen merupakan unsur pembuat keputusan yang telah digariskan oleh rapat anggota. Dalam hal yang kedua, pemerintah menetapkan bahwa koperasi bertujuan untuk menambah kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Seperti badan usaha yang lain, koperasi juga akan menghadapi berbagai persoalan dalam mencapai tujuan. Sebagian besar tugas manajemen adalah memecahkan persoalan-persoalan itu dan membuat putusan-putusan yang akan menuju sasaran yang dikehendaki.

Sonny Sumarsono (2003:75) menjelaskan, langkah-langkah yang diambil dalam memecahkan sesuatu persoalan adalah :

- a. Membuat persoalan yang dihadapi menjadi jelas;
- b. Mencari alternatif-alternatif untuk memecahkannya;
- c. Memilih salah satu cara atau alternatif yang paling sesuai dengan tujuan koperasi;
- d. Menilai hasil cara tersebut.

Kinerja Koperasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kinerja merupakan kemampuan kerja. Priansa dan Suwatno (2013:196) mendefinisikan, “kinerja sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku, dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pekerjaan serta perilaku dan tindakannya.” Sementara itu, Wilson Bangun (2012:231) mendefinisikan kinerja atau *performance* sebagai hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan.

Suryadi Prawirosentono (2014:2) menyatakan, “kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.”

Pemeringkatan Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi Pasal 1 Ayat 5, pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.

Tujuan Pemeringkatan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 06/Per/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi Pasal 2, tujuan pemeringkatan koperasi adalah :

- a. Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;
- b. Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi;
- c. Mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.

Aspek-Aspek Penilaian

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi Pasal 4 Ayat (1), agar dapat menggambarkan secara utuh mengenai badan usaha koperasi, maka landasan berfikir Pengembangan Sistem Pemeringkatan Koperasi didasarkan pada tiga sifat koperasi yaitu Koperasi Sebagai Badan Usaha, Koperasi sebagai kumpulan orang dan koperasi sebagai Akselerasi Pembangunan. Agar sistem pemeringkatan koperasi dapat memberikan hasil yang menggambarkan secara utuh koperasi sebagai badan usaha, maka indikator penilaian dalam sistem pemeringkatan koperasi mencakup aspek-aspek yang mewakili kecirian sebagai badan usaha dan kecirian sebagai koperasi berkualitas yaitu :

- a. Aspek Badan Usaha Aktif
- b. Aspek Kinerja Usaha yang semakin kuat
- c. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota
- d. Aspek Orientasi Kepala Pelayanan Anggota
- e. Aspek pelayanan kepada masyarakat
- f. Aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah

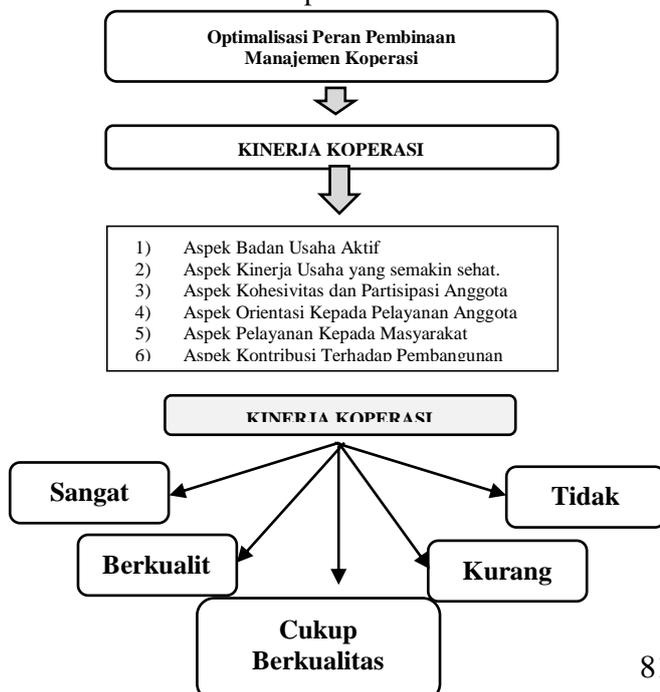
Pengembangan Hiptotesis

Berdasarkan Surat Edaran Deputy Bidang Kelembagaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi dan Lembaga Independen Pemeringkatan Koperasi, Koperasi sebagai badan usaha yang didirikan oleh dan berbasis anggotanya perlu membangun dirinya agar menjadi sehat, tangguh dan mandiri berdasarkan prinsip

koperasi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja koperasi melalui program pemerintakatan koperasi. Tujuan pemerintakatan koperasi adalah :

- a. Mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;
- b. Menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Tumbuhnya kesadaran koperasi akan pentingnya hasil pemerintakatan koperasi;
- d. Meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan koperasi;
- e. Meningkatnya lembaga pemerintakat yang independen dan kredibel serta memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang perkoperasian.

Pedoman pemerintakatan koperasi seyogyanya selalu mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan zaman. Sebelum sampai ke tahap yang terbaru hingga saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menerbitkan pedoman pemerintakatan koperasi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 22/Per.M.KUKM/IV/2007, selanjutnya melalui Peraturan menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 21/er/M.KUKM/IX/2015 hingga saat ini terbit Surat Edaran Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 9/2018 tentang Pelaksanaan Pemerintakatan Koperasi dan Lembaga Independen Pemerintakat Koperasi yang menindaklanjuti Pasal 151 huruf (P) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.



3. METODE PENELITIAN

Sugiyono (2016:227) menjelaskan, Metode kuantitatif dan kualitatif sering dipasangkan dengan nama metode yang tradisional, dan metode baru, metode positivistik dan metode postpositivistik, metode *scientific* dan metode artistik, metode konfirmasi dan *discovery*/temuan, serta kuantitatif dan interpretif. Jadi metode kuantitatif sering dinamakan metode tradisional, positivistik, *scientific* dan metode konfirmatif. Selanjutnya metode kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, postpositivistik, *scientific* dan metode konfirmatif. Selanjutnya metode kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, postpositivistik, artistik dan *interpretive research*. Kedua peneliti kuantitatif dan kualitatif, sama-sama akan mencari temuan dengan cara yang berbeda. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument* yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka tehnik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai pengumpulan data secara gabungan / simultan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan strategi yang cocok bila pokok

pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how and why*.

Peneliti menggunakan studi kasus karena penulis beranjak dari sebuah permasalahan yang berada di Kabupaten Sumedang yang berhubungan dengan optimalisasi peran pembinaan manajemen koperasi dalam meningkatkan kinerja koperasi di Kabupaten Sumedang (Koperasi Pegawai Republik Indonesia KORPS Pegawai Kesehatan Sumedang, Koperasi Karyawan (KOKAR) PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat UP3 Sumedang, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al-Amanah Sumedang). Studi kasus adalah metode *riset* yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk peneliti menguasai dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Karena itu, peneliti dapat menggunakan wawancara mendalam kuisioner hasil survei rekaman dan bukti-bukti fisik lainnya. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, tentunya peneliti akan menggunakan informan dalam pemenuhan aspek tujuan penelitian. Informan diperlukan untuk memperoleh informasi secara akurat dan tepat.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia KORPS Pegawai Kesehatan Sumedang	1 orang
2	Badan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia KORPS Pegawai Kesehatan Sumedang	1 orang
3	Ketua Koperasi Koperasi Karyawan PLN Sumedang	1 orang
4	Badan Pengawas Koperasi Karyawan PLN Sumedang	1 orang
5	Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al-Amanah Sumedang	1 orang
6	Badan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al-Amanah Sumedang	1 orang
	Jumlah	6 Orang

Sumber : Data hasil penelitian, diolah tahun 2019.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Display Data Pembinaan manajemen koperasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

Display data dalam penelitian ini peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. Untuk menganalisis data dengan penyajian data (data display) dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga cara yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data. Dalam wawancara mendalam ini dijelaskan sebelumnya mekanisme yang akan dilakukan oleh peneliti.

Hambatan Dalam Rangka pembinaan manajemen koperasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

Pembinaan koperasi adalah suatu arahan, atau tindakan yang diberikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusiakoperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Pembinaan koperasidilakukan melalui seleksi, koordinasi, fasilitasi, bimbingan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan pembinaan teknis terhadap koperasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Memantau perkembangan kegiatan koperasi secara berkala melalui laporan kinerja koperasi yang bersangkutan;
- b. Melakukan pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta pelaksanaan program pembinaan kepada anggota.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam memberikan pembinaan terhadap koperasi dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Perbaikan manajemen koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha dan keuangan;
- b. Perkuatan modal;
- c. Penilaian kesehatan koperasi;
- d. Pendidikan dan pembinaan usaha anggota;
- e. Pemberian tindakan administratif.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan pengawasan terhadap

koperasi dengan menggunakan unsur-unsur yang harus dipantau yaitu meliputi:

- a. Jenis kelengkapan laporan setiap tahun sekali
- b. Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah RAT dilaksanakan dan RAT selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus dilaporkan pelaksanaannya;
- c. Kelengkapan informasi laporan sesuai dengan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang diatur oleh Peraturan Menteri;
- d. Kesesuaian pelakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh pemikirannya berdasarkan prinsip akuntansi pedoman umum koperasi yang berlaku secara umum;
- e. Kesesuaian penyajian laporan keuangan yang memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdapat hambatan-hambatan meliputi:

- a. Tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- b. Beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian kepada koperasi-koperasi.
- d. Pengurus koperasi dan masyarakat perlu disadarkan akan hukum perkoperasian dengan dilakukan penyuluhan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat secara terus-menerus agar tercipta budaya hukum koperasi yang sesuai dengan konsep hukum perkoperasian.
- e. Perlu meningkatkan kapabilitas pegawai dalam pembinaan dan pengawasan koperasi, disamping itu penambahan pegawai dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang efektif merupakan suatu keniscayaan.

Upaya Yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan Dalam Rangka pembinaan manajemen koperasi oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang

Untuk mengatasi tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT setiap tahun, maka pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dapat menghubungi koperasi yang bersangkutan untuk secepatnya menyampaikan laporan RAT tahunan yang dikelola oleh pengurus koperasi tersebut. Apabila dalam menghubungi koperasi yang bersangkutan dirasa belum cukup maka dimungkinkan **Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang** akan mendatangi koperasi tersebut guna memperoleh informasi mengenai laporan RAT koperasi. Kemudian apabila koperasi yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan laporan RAT selama tiga tahun berturut-turut atau pasif tidak menjalankan aktivitas perkoperasian yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dapat menggabungkan dengan koperasi lain atau membubarkannya dengan mencabut akta pendirian koperasi tersebut. Pembubaran koperasi yang tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Pelaksanaan pembubaran koperasi dilakukan dibawah pengawasan Menteri.

Mengenai oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini sering terjadi di daerah pasar-pasar tradisional. Dimana biasanya pengurus koperasi memanfaatkan KTP palsu atau ikut menggunakan uang pinjaman dari masyarakat untuk kepentingan pribadi. Munculnya pihak-pihak yang menjadi makelar kredit bagi pedagang pasar dan sekitarnya ini sangat mencoreng nama baik koperasi. Peristiwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang fungsi dan peran Koperasi yang berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan memberantas koperasi kredit, diharapkan sikap perilaku masyarakat sekitar dapat berubah dan meningkatkan pendapatan perekonomian mereka dengan bekerja tekun dan rajin. Tumbuhnya makelar kredit dalam diri koperasi sebenarnya hanya untuk kepentingan beberapa pihak saja. Kurangnya keaktifan anggota dalam ikut mengawasi dan kurangnya kesadaran anggota dalam memiliki dan mempertahankan koperasi dapat dinilai dari sedikitnya anggota yang hadir pada saat RAT. Rapat yang seharusnya menjadi

tempat berkeluh kesah inisering anggota lalaikan. Seharusnya pengurus mewajibkan anggota aktif dan pasif dalam mengikuti RAT, sehingga dapat bersama-sama mengawasi koperasi dan tentunya koperasi akan berjalan sehat sesuai dengan aturan yang ada. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan oknum yang tidak menjalankan kegiatan perkoperasian sesuai Undang-Undang akan diberikan sanksi tegas. Jika dirasa koperasi sudah tidak dapat dipertahankan karena sikap perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dapat melakukan pembubaran koperasi karena kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Kemudian apabila para anggota koperasi bersangkutan merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka anggota koperasi dapat mengusulkan mengenai pembubaran koperasi melalui rapat anggota. Pembubaran koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Menteri. Kurangnya intensitas pembinaan oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang kepada koperasi-koperasi juga menjadi hambatan. Kurangnya pegawai menjadi faktor yang menghambat keaktifan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang hal ini yang menjadi alasan intensitas pertemuan antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dengan pengurus koperasi hanya terjadi ketika suatu koperasi akan mengadakan RAT. Intensitas pertemuan/kunjungan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Kabupaten Karanganyar ke koperasi-koperasi di daerahnya harus ditambah. Selain itu pelatihan-pelatihan bagi koperasi juga harus diagendakan secara rutin. Bila koperasi sendiri tidak aktif dalam mengikuti, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang harus berani mengambil tindakan berupa pemberian sanksi agar koperasi yang tidak aktif jera. Keaktifan tidak hanya dari pengurus koperasi-koperasi daerah, namun pegawai sebagai struktur yang ada dalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Sumedang juga harus menyadari kurangnya keaktifan mereka dalam berkunjung. Apabila selama ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang berkunjung apabila mendapatkan undangan RAT dari koperasi, maka kebiasaan itu harus diubah. Sebagai dinas yang dipercaya membina dan mengawasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang juga harus memberikan kunjungan rutin terhadap koperasi-koperasi di daerah terutama koperasi di Kabupaten Karanganyar yang kurang aktif. Kurangnya pegawai menjadi kendala mereka dalam pembinaan dan pengawasan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang beranggapan bahwa 15 orang pegawai tidak mumpuni dalam menanggapi 1146 koperasi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Selain itu faktor anggaran yang terbatas juga menjadi kendala bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam menjalankan aktifitas yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan koperasi-koperasi. (Hasil wawancara dengan Bapak Aldolfus Joce, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan penelitian di lapangan maka dapat penulis simpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam melakukan pembinaan koperasi dilaksanakan dengan cara memantau perkembangan kegiatan koperasi secara berkala melalui perbaikan manajemen koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha dan keuangan, perkuatan modal, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pembinaan usaha anggota, pemberian tindakan administratif. Sedangkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi dilaksanakan dengan cara pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan koperasi.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi di daerah Kabupaten Karanganyar terdapat hambatan-hambatan yaitu tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, beberapa oknum pengurus

koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas pembinaan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang kepada koperasi-koperasi. Solusi untuk mengatasi tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT tahunan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang menghubungi pengurus koperasi yang bersangkutan untuk secepatnya menyampaikan laporan RAT tahunan. Kemudian solusi untuk mengatasi oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang melakukan investigasi secara mendalam yang kemudian akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Solusi mengenai kurangnya intensitas pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang kepada koperasi-koperasi daerah yang disebabkan kurangnya pegawai dan anggaran, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang mengajukan penambahan pegawai dan anggaran.

Temuan Hasil Penelitian dan Penafsiran

Berdasarkan hasil penjelasan hasil penelitian, uji kredibilitas melalui proses wawancara dimana dari ke lima informan yang diwawancarai memberikan implementasi yang sama terkait dengan peran pemerintah dalam pembinaan manajemen koperasi di Kabupaten Sumedang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari penilaian kinerja koperasi yang dilihat dari dokumen Laporan Tahunan Koperasi yang disampaikan melalui Rapat Anggota Tahunan dari tiga koperasi yaitu KPRI KPKS Sumedang, Koperasi Karyawan PT PLN (Persero Cabang Sumedang) dan BMT Al Amanah Sumedang dilihat dari Aspek Badan Usaha Aktif, Aspek Kinerja usaha yang semakin Baik, Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota, Aspek Orientasi Kepada Pelayanan Anggota, Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat, dan Aspek Kontribusi Terhadap Pembangunan dapat dikategorikan berkualitas.

Dari hasil penelitian tersebut, bahwa dapat dikategorikan berkualitas hal ini dibuktikan masih banyaknya komponen-komponen permodalan koperasi yang masih harus ditunjang dengan peran serta pemerintah maupun badan usaha milik pemerintah untuk membantu koperasi dari unsur

permodalan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola koperasi.

Kondisi koperasi setelah dilakukan pembinaan manajemen koperasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam hal ini sudah mengalami ke arah kemajuan atau ada peningkatan walaupun berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya karena banyaknya faktor persaingan bisnis dengan lembaga keuangan perbankan yang memberikan kemudahan-kemudahan sehingga menarik para nasabah untuk lebih menitipkan uangnya di Bank ketimbang ikut menjadi anggota koperasi dan menitipkan uangnya di koperasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pembinaan manajemen koperasi yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam melakukan pembinaan koperasi dilaksanakan dengan memantau perkembangan kegiatan koperasi secara berkala melalui perbaikan manajemen koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha dan keuangan, penguatan modal, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pembinaan usaha anggota, pemberian tindakan administratif telah memberikan dampak positif dalam peningkatan peran koperasi di Kabupaten Sumedang.
- b. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi dilaksanakan terdapat berbagai hambatan-hambatan yaitu tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas pembinaan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang kepada koperasi-koperasi di Kabupaten Sumedang. Hal ini membuktikan walaupun sudah dilakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi di Kabupaten Sumedang masih ada yang koperasi yang tidak disiplin terhadap kewajiban pelaporan kegiatan koperasi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang selaku instansi yang berwenang untuk memberikan ijin operasional pelaksanaan usaha – usaha koperasi.

6. REFERENSI

- Ahmad.(2012). Akuntansi Biaya. Edisi 3. Bandung : Salemba Empat.
- Baswir Revsond (2010). Koperasi Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPF
- Bangun, Wilson.(2013).Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Gaspersz Vincent.(2012). All In One Production and Inventori Management, Edisi 8. Bogor.
- Gunawan Imam.(2016). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hardiansyah (2010). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media.
- Kuncoro Mudrajad.(2013). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 4, Jakarta Erlangga.
- Kenneth D. Bailey (2014). Methods of Social Research. Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri UKM No. 06/Per/M.KUKM/III/2008 Tentang Pedoman Peningkatan Koperasi. <https://www.jdih.setneg.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2019.
- Lexy J. Moleong (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 BMT Al-Amanah Sumedang.
- Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pegawai Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Koperasi Karyawan Industri (KOPKARIN) PT. Kahatex Kabupaten Sumedang
- Muljono Djoko.(2012). Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Andi : Yogyakarta.
- Nasution, Thamrin.(2006). Metode Penelitian Naturalistik. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nawawi Hadari.(2005). Penerapan Terapan. Yogyakarta : Gaah Mada University. Press.
- Prawirosentono Suryadi.(2014). Kinerja. Bandung : Alfabeta.
- Priatna, Suwatno.(2013). Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Diunduh dari <https://www.jdih.setneg.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2019.
- Rangkuti Freddy.(2007). Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rurchan Arif, (2012). Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Siagian Sondang.(2005). Fungsi-Fungsi Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sitio Arifin.(2001). Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta : Erlangga.
- Soejono, Sulistyowati.(2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono.(2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Februari 2017. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Afabeta.
- Sugiyono.(2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Cetakan Ke-24 Februari 2017. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto.(2013). Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumarsono Sonny.(2003). Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Supardi.(2015). Penelitian Pendidikan Kelas. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Diunduh dari <https://www.jdih.setneg.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2019.
- Wirawan.(2014). Evaluasi Kinerja, Edisi Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Yakin Hafsih Ipa.(2017). *Metodologi Penelitian*. Bandung : Karima.